



## Peran Filsafat dalam Memahami Transformasi Sosial dan Budaya

**Ummu Mutia Pasaribu**

Institut Agama Islam Padang Lawas

**Fitri Lannora Nst**

Institut Agama Islam Padang Lawas

**Dania Nasution**

Institut Agama Islam Padang Lawas

**Rezki Khairani Hasibuan**

Institut Agama Islam Padang Lawas

**Anggina Safitri**

Institut Agama Islam Padang Lawas

**Dini Khairani Hasibuan**

Institut Agama Islam Padang Lawas

**Anita Sari Daulay**

Institut Agama Islam Padang Lawas

**Alwi Sahaf Lubis**

Institut Agama Islam Padang Lawas

**Nurhayati Siregar**

Institut Agama Islam Padang Lawas

Alamat: Jl. Kihajar Dewantara No.66, Huta Ibus, Kec. Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas

Penulis Korespondensi: [yatisiregar18@gmail.com](mailto:yatisiregar18@gmail.com)

**Abstract.** *The demographic bonus represents a strategic opportunity for Indonesia to accelerate national development toward the Indonesia Golden Vision 2045. However, its successful realization largely depends on the quality of substantive democracy. This study aims to analyze the relationship between the demographic bonus and substantive democracy and their implications for national development. The research employs a qualitative approach using a library research method. Data were collected from government documents, reports of international organizations, books, and peer-reviewed scientific journals, and were analyzed through content analysis involving literature selection, interpretation, and critical synthesis. The findings indicate that the demographic bonus cannot be optimally transformed into sustainable development without democratic, transparent, accountable, and participatory governance. Democratic backsliding, characterized by weakened civil institutions, declining public participation, and the strengthening of oligarchic practices, may hinder human capital development, employment opportunities, and inclusive economic growth. Therefore, strengthening substantive democracy is essential as a prerequisite for maximizing the demographic bonus and achieving sustainable national development toward Indonesia Golden Vision 2045.*

**Keywords:** *Demographic Bonus, National Development, Indonesia Golden Vision 2045*

**Abstrak.** Bonus demografi merupakan peluang strategis bagi Indonesia untuk mempercepat pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, namun keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kualitas demokrasi substantif. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara bonus demografi dan demokrasi substantif serta implikasinya terhadap pembangunan nasional. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari dokumen pemerintah, laporan lembaga internasional, buku, dan jurnal ilmiah yang dianalisis menggunakan teknik content analysis melalui proses seleksi, interpretasi, dan sintesis kritis. Hasil kajian menunjukkan bahwa bonus demografi tidak akan memberikan manfaat optimal tanpa tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Kemunduran demokrasi yang ditandai dengan melemahnya institusi sipil, rendahnya partisipasi publik, serta menguatnya praktik oligarki berpotensi menghambat peningkatan

kualitas sumber daya manusia, kesempatan kerja, dan pembangunan yang inklusif. Oleh karena itu, penguatan demokrasi substantif perlu menjadi prasyarat utama dalam mengoptimalkan bonus demografi guna mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

**Kata Kunci:** Bonus Demografi, Pembangunan Nasional, Indonesia Emas 2045

## **1. LATAR BELAKANG**

Indonesia sedang berada pada momentum penting berupa bonus demografi, yaitu kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif jauh lebih besar dibandingkan penduduk usia nonproduktif. Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan bahwa sekitar 69,3% penduduk Indonesia berada pada usia produktif (15–64 tahun). Kondisi ini menjadi peluang strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing nasional, serta mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Namun demikian, bonus demografi tidak secara otomatis menghasilkan kesejahteraan apabila tidak didukung oleh kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan yang baik, serta sistem demokrasi yang mampu menjamin partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, keberhasilan memanfaatkan bonus demografi sangat dipengaruhi oleh kemampuan negara membangun institusi politik yang inklusif dan demokratis (Meo et al., 2025).

Fenomena yang berkembang menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengoptimalkan bonus demografi. Tingkat pengangguran terbuka kelompok usia muda masih relatif tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya, sementara sebagian besar tenaga kerja masih bekerja pada sektor informal dengan produktivitas yang rendah (Noor & Shaddiq, 2023). Di sisi lain, berbagai laporan nasional maupun internasional menunjukkan adanya penurunan kualitas demokrasi di Indonesia yang ditandai dengan melemahnya kebebasan sipil, menurunnya partisipasi politik masyarakat, serta rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi negara. Kondisi tersebut berpotensi menghambat proses pembangunan karena demokrasi yang berkualitas merupakan prasyarat terciptanya kebijakan publik yang responsif, akuntabel, dan berpihak pada pengembangan sumber daya manusia (Rakhmadi, 2024).

Kajian mengenai bonus demografi di Indonesia selama ini lebih banyak menitikberatkan pada aspek ekonomi, ketenagakerjaan, pendidikan, maupun pembangunan sumber daya manusia (Wibowo et al., 2026). Misalnya, penelitian (Sutikno, 2020) menjelaskan bahwa bonus demografi hanya akan memberikan manfaat ekonomi apabila didukung peningkatan kualitas pendidikan dan penciptaan lapangan kerja produktif. Penelitian Nugroho et al. (2022) juga menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam mengoptimalkan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Sementara itu, penelitian mengenai demokrasi di Indonesia umumnya lebih memfokuskan pembahasan pada kualitas demokrasi, pelemahan institusi politik, maupun partisipasi masyarakat dalam pemerintahan tanpa mengaitkannya dengan dinamika kependudukan dan bonus demografi (Hidayat et al., 2026). Hal ini menunjukkan bahwa kedua isu tersebut masih banyak dikaji secara parsial.

Dari perspektif ilmu sosial dan politik, demokrasi substantif menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan bonus demografi dapat dikonversi menjadi modal pembangunan. Demokrasi tidak hanya dipahami sebagai mekanisme pemilihan umum, tetapi juga sebagai sistem yang menjamin kebebasan berpendapat, keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan, transparansi pemerintahan, dan distribusi kesempatan yang adil. Ketika kualitas demokrasi mengalami kemunduran, peluang generasi muda untuk berpartisipasi dalam pembangunan, memperoleh akses pendidikan

yang berkualitas, maupun meningkatkan mobilitas sosial menjadi semakin terbatas. Sebaliknya, demokrasi yang inklusif mampu mendorong inovasi, memperkuat modal sosial, dan meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan sehingga bonus demografi dapat dimanfaatkan secara optimal.

Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat Indonesia sedang memasuki periode yang menentukan menuju Indonesia Emas 2045. Bonus demografi diperkirakan hanya terjadi satu kali dalam sejarah kependudukan Indonesia sehingga kegagalan memanfaatkannya akan menimbulkan berbagai konsekuensi sosial, ekonomi, dan politik, seperti meningkatnya pengangguran, ketimpangan sosial, serta rendahnya produktivitas nasional. Pada saat yang sama, kecenderungan menurunnya kualitas demokrasi dapat mempersempit ruang partisipasi generasi muda dalam proses pembangunan dan mengurangi efektivitas kebijakan publik yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang mampu menjelaskan hubungan antara bonus demografi dan demokrasi substantif secara komprehensif sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan nasional.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang cukup jelas. Sebagian besar penelitian Indonesia membahas bonus demografi dari perspektif ekonomi, ketenagakerjaan, pendidikan, atau pembangunan manusia, sedangkan penelitian mengenai demokrasi lebih banyak mengkaji kualitas institusi politik, partisipasi politik, maupun tata kelola pemerintahan. Belum banyak penelitian yang mengintegrasikan kedua isu tersebut untuk menjelaskan bagaimana kualitas demokrasi substantif memengaruhi keberhasilan pemanfaatan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan menganalisis hubungan timbal balik antara bonus demografi dan demokrasi substantif sebagai dua elemen yang saling menentukan dalam pembangunan nasional. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian filsafat politik, ilmu sosial, dan studi pembangunan sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif bagi pemerintah dalam menghadapi tantangan Indonesia Emas 2045.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat analitis-kritis untuk mengkaji hubungan antara bonus demografi dan demokrasi substantif dalam konteks pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan interpretasi dan sintesis konseptual terhadap berbagai teori, kebijakan, dan temuan penelitian yang relevan. Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi dokumen resmi pemerintah, seperti publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Ketenagakerjaan, peraturan perundang-undangan, serta laporan lembaga internasional, antara lain *International Labour Organization* (ILO), *United Nations Development Programme* (UNDP), *World Bank*, *Freedom House*, dan *Varieties of Democracy (V-Dem) Institute*. Adapun sumber sekunder berupa jurnal ilmiah terakreditasi, buku referensi, prosiding, dan publikasi akademik yang relevan dengan kajian demografi, pembangunan, ilmu politik, sosiologi, serta demokrasi. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis isi (*content analysis*) dengan tahapan inventarisasi dan seleksi literatur berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan kebaruan publikasi, dilanjutkan dengan pengelompokan dan interpretasi data untuk mengidentifikasi pola hubungan

antara bonus demografi dan demokrasi substantif, kemudian disintesis secara kritis menggunakan perspektif pembangunan manusia, teori demokrasi, serta kajian politik Indonesia kontemporer guna menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan penelitian.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Dinamika Bonus Demografi Indonesia: Peluang dan Ancaman Struktural**

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa struktur usia penduduk Indonesia pada tahun 2023 didominasi oleh kelompok usia produktif yang mencapai 69,3 persen dari total populasi. Secara teoretis, kondisi ini sejalan dengan konsep bonus demografi yang dikembangkan oleh David Bloom, David Canning, dan Jaypee Sevilla, yang menyatakan bahwa perubahan struktur usia dapat memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi apabila diimbangi oleh kebijakan ketenagakerjaan, pendidikan, dan kesehatan yang adekuat. Namun, potensi tersebut bersifat kondisional, bukan otomatis. Pengalaman sejumlah negara Amerika Latin pada dekade 1980 dan 1990-an memperlihatkan bahwa bonus demografi yang tidak dikelola dengan baik justru berubah menjadi tekanan sosial, ditandai oleh pengangguran struktural dan ketidakstabilan politik.

Di Indonesia, gejala serupa mulai terlihat. Data Sakernas BPS mengindikasikan bahwa tingkat pengangguran terbuka di kalangan pemuda jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya, sementara laporan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan Bank Dunia menegaskan bahwa lebih dari separuh angkatan kerja Indonesia masih terserap pada sektor informal yang dicirikan oleh produktivitas rendah, perlindungan sosial minim, dan keterbatasan akses terhadap peningkatan keterampilan. Kombinasi antara pertumbuhan angkatan kerja yang pesat dan ketersediaan lapangan kerja berkualitas yang terbatas menciptakan apa yang dapat disebut sebagai jebakan bonus demografi, yakni situasi ketika potensi demografis tidak terkonversi menjadi produktivitas ekonomi, melainkan justru menumpuk sebagai persoalan sosial.

Lebih jauh, riset pembangunan kontemporer menegaskan bahwa konversi bonus demografi menjadi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak semata-mata persoalan teknokratis mengenai keterampilan dan investasi modal manusia, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola politik. Argumen ini menjadi pijakan penting bagi pembahasan selanjutnya mengenai mengapa demokrasi substantif harus dipahami sebagai variabel sentral, bukan sekadar konteks politik yang menyertai proses pembangunan ekonomi.

#### **Demokrasi Substantif: Antara Cita Normatif dan Realitas Empiris**

Larry Diamond membedakan secara tegas antara demokrasi elektoral dan demokrasi liberal yang substantif. Demokrasi elektoral hanya mensyaratkan adanya pemilu yang kompetitif, sementara demokrasi substantif menuntut lebih jauh: supremasi hukum, akuntabilitas horizontal antarlembaga negara, kebebasan sipil, dan partisipasi publik yang bermakna. Giovanni Sartori menambahkan bahwa demokrasi prosedural tanpa kualitas substantif rentan berubah menjadi oligarki yang bersembunyi di balik fasad elektoral. Pembedaan ini relevan untuk membaca situasi Indonesia, di mana pemilu tetap terselenggara secara reguler, tetapi indeks-indeks demokrasi internasional seperti Freedom House dan V-Dem Institute secara konsisten mencatat tren penurunan kualitas demokrasi substantif sejak pertengahan dekade 2010-an.

Nancy Bermeo, dalam kajiannya tentang variasi kontemporer kemunduran demokrasi (*democratic backsliding*), menjelaskan bahwa kemunduran demokrasi pada

era ini umumnya tidak berlangsung melalui kudeta militer yang dramatis, melainkan melalui erosi bertahap atas independensi peradilan, pembatasan kebebasan pers, dan pelemahan lembaga pengawas yang dilakukan oleh aktor yang justru terpilih secara demokratis. Pola ini sangat sesuai dengan temuan Vedi Hadiz dan Marcus Mietzner mengenai Indonesia, di mana oligarki politik-ekonomi pasca-Orde Baru memanfaatkan instrumen elektoral untuk melegitimasi konsolidasi kekuasaan, sembari secara perlahan mengurangi ruang kontestasi yang bermakna bagi kelompok masyarakat sipil dan oposisi.

Guillermo O'Donnell mengingatkan bahwa demokrasi yang hanya bertumpu pada legitimasi elektoral tanpa diimbangi penegakan akuntabilitas horizontal cenderung berkembang menjadi delegative democracy, yakni demokrasi di mana kekuasaan eksekutif memperoleh ruang yang sangat luas untuk bertindak tanpa pengawasan efektif dari lembaga legislatif maupun yudikatif. Juan Linz dan Alfred Stepan menambahkan bahwa konsolidasi demokrasi yang sesungguhnya mensyaratkan lima arena yang saling menguatkan, yaitu masyarakat sipil yang bebas, masyarakat politik yang otonom, supremasi hukum, birokrasi negara yang profesional, dan masyarakat ekonomi yang berfungsi baik. Ketika salah satu arena melemah, sebagaimana terjadi pada masyarakat sipil dan supremasi hukum di Indonesia belakangan ini, seluruh sistem demokrasi menjadi rentan terhadap regresi.

### **Tinjauan Filosofis: Rasionalitas Publik, Ruang Sipil, dan Krisis Epistemik**

Dari sudut pandang filsafat politik, persoalan kemunduran demokrasi tidak dapat direduksi menjadi sekadar kegagalan institusional, melainkan juga merupakan krisis rasionalitas publik. Jürgen Habermas menegaskan bahwa legitimasi politik modern bersandar pada keberadaan ruang publik deliberatif, yakni arena di mana warga negara dapat berargumentasi secara setara dan rasional untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai kepentingan umum. Ketika ruang ini dibatasi, baik melalui represi terhadap kebebasan berekspresi maupun melalui disinformasi yang masif, maka demokrasi kehilangan fondasi rasionalnya, meskipun secara formal pemilu tetap berlangsung.

Hannah Arendt, dalam karyanya mengenai kondisi manusia modern, menempatkan tindakan politik kolektif di ruang publik sebagai bentuk kebebasan yang paling otentik. Arendt memperingatkan bahwa totalitarisme dan otoritarianisme tidak selalu lahir dari kekuasaan represif yang kasar, tetapi sering kali muncul dari atomisasi sosial, yaitu kondisi ketika individu kehilangan keterhubungan dengan sesama warga dan dengan demikian kehilangan kapasitas untuk bertindak secara politik. Fenomena apatisisme politik generasi muda yang terjebak dalam pengangguran dan prekarisasi kerja di Indonesia dapat dibaca sebagai bentuk kontemporer dari atomisasi tersebut.

Penelitian filsafat terbaru juga semakin menyoroti dimensi epistemik dari kemunduran demokrasi. Krisis epistemik, yang ditandai oleh polarisasi wacana publik, menyebarnya disinformasi melalui media digital, dan menurunnya kepercayaan terhadap otoritas keilmuan maupun jurnalistik, mempersulit terbentuknya kesepakatan bersama mengenai fakta dasar yang diperlukan bagi deliberasi demokratis yang sehat. Martha Nussbaum menambahkan perspektif kapabilitas, yang menekankan bahwa demokrasi substantif menuntut tersedianya kapabilitas dasar bagi warga negara, termasuk kapabilitas untuk berpikir kritis dan berpartisipasi secara bermakna, sebuah kapabilitas yang justru tergerus ketika sistem pendidikan dan ruang sipil melemah secara bersamaan.

Michel Foucault, melalui analisisnya tentang relasi pengetahuan dan kekuasaan, memberikan pisau analisis tambahan untuk membaca bagaimana wacana resmi negara dapat membentuk persepsi publik mengenai apa yang dianggap sah dan tidak sah dalam partisipasi politik. Ketika negara dan kelompok oligarkis menguasai produksi wacana

melalui kontrol media dan regulasi yang represif, ruang bagi wacana tandingan dari masyarakat sipil menjadi semakin sempit, sehingga kemunduran demokrasi berlangsung secara halus namun sistemik.

### **Tinjauan Ilmu Sosial: Struktur, Agensi, dan Reproduksi Ketidaksetaraan**

Ilmu sosial kontemporer menawarkan kerangka analitis untuk memahami bagaimana struktur sosial-politik membatasi maupun memungkinkan tindakan agen-agen sosial. Anthony Giddens, melalui teori strukturasi, menjelaskan bahwa struktur dan agensi bukan dua entitas yang berhadap-hadapan, melainkan saling membentuk melalui praktik sosial yang berulang. Dalam konteks Indonesia, pelemahan institusi demokrasi dapat dipahami sebagai perubahan struktural yang, pada gilirannya, membentuk kembali pola tindakan politik generasi muda, misalnya melalui menurunnya partisipasi dalam organisasi kemasyarakatan dan meningkatnya sikap pragmatis-transaksional terhadap politik elektoral.

Pierre Bourdieu memperkenalkan konsep modal sosial dan modal budaya sebagai faktor penentu posisi individu dalam struktur masyarakat, di samping modal ekonomi. Generasi muda dari kelompok sosial-ekonomi rentan cenderung memiliki modal sosial dan budaya yang lebih terbatas untuk mengakses pendidikan berkualitas maupun jejaring politik yang berpengaruh, sehingga ketimpangan struktural cenderung direproduksi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Robert Putnam menambahkan bahwa modal sosial, yang tercermin dalam kepercayaan antarwarga dan partisipasi dalam asosiasi sukarela, merupakan prasyarat penting bagi keberfungsian institusi demokratis; ketika kepercayaan publik terhadap elite dan institusi negara merosot, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai survei opini publik di Indonesia, modal sosial yang menjadi perekat demokrasi turut terkikis.

Kajian sosiologi politik mengenai Indonesia pasca-Reformasi juga menunjukkan bahwa demokratisasi elektoral tidak serta-merta menghasilkan mobilitas sosial yang inklusif. Sebaliknya, sejumlah penelitian mencatat terbentuknya kembali kelas politik-ekonomi yang relatif tertutup, yang menguasai akses terhadap sumber daya negara melalui jejaring patronase. Pola ini menjelaskan mengapa kebijakan ketenagakerjaan dan pendidikan, meskipun secara nominal diarahkan untuk memanfaatkan bonus demografi, sering kali gagal menjangkau kelompok-kelompok yang paling membutuhkan, karena perumusannya tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna sebagaimana dituntut oleh prinsip demokrasi substantif.

### **Tinjauan Budaya: Identitas, Wacana, dan Transformasi Budaya Politik**

Stuart Hall, dalam tradisi studi budaya kritis, berargumen bahwa identitas dan budaya politik bukan sesuatu yang statis, melainkan terus dibentuk melalui pertarungan wacana dan relasi kekuasaan yang berlangsung dalam masyarakat. Dengan demikian, budaya politik apatis atau permisif terhadap praktik oligarkis yang tampak menguat di kalangan sebagian generasi muda Indonesia perlu dipahami bukan sebagai sifat bawaan, melainkan sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat berubah seiring dengan perubahan struktur kesempatan ekonomi dan politik yang mereka hadapi.

Clifford Geertz, melalui pendekatan antropologi interpretatif, menekankan bahwa kebijakan dan praktik politik senantiasa berakar pada sistem makna budaya yang dianut oleh masyarakat setempat. Reformasi tata kelola yang dirancang tanpa mempertimbangkan konteks budaya lokal, misalnya kebijakan ketenagakerjaan yang seragam tanpa mengakomodasi keragaman struktur sosial-budaya di berbagai daerah, berisiko menemui resistensi atau kegagalan implementasi, karena dianggap tidak relevan dengan sistem makna yang hidup dalam masyarakat penerima kebijakan.

Penelitian budaya kontemporer di Indonesia juga menyoroti peran media sosial dan budaya digital dalam membentuk ulang ekspresi politik generasi muda. Di satu sisi, ruang digital membuka peluang baru bagi partisipasi politik informal, seperti gerakan advokasi daring dan kampanye kesadaran publik. Di sisi lain, ruang yang sama juga menjadi arena penyebaran disinformasi dan polarisasi identitas yang justru memperlemah kohesi sosial yang dibutuhkan bagi demokrasi substantif. Transformasi budaya politik ini menegaskan bahwa kemunduran demokrasi dan dinamika bonus demografi tidak dapat dipahami secara memadai tanpa memperhitungkan dimensi budaya sebagai medan tempat nilai-nilai kewargaan dinegosiasikan setiap hari.

### **Interseksi Bonus Demografi dan Kemunduran Demokrasi: Sintesis Konseptual**

Berdasarkan tinjauan filsafat, ilmu sosial, dan budaya di atas, dapat disusun sebuah sintesis konseptual bahwa hubungan antara bonus demografi dan demokrasi substantif bersifat resiprokal, bukan satu arah. Pada satu sisi, demokrasi substantif menyediakan prasyarat institusional bagi konversi bonus demografi melalui kebijakan pendidikan dan ketenagakerjaan yang partisipatif dan akuntabel. Pada sisi lain, keberhasilan konversi demografis turut memperkuat basis sosial bagi demokrasi, karena warga negara yang produktif dan berpendidikan lebih mungkin memiliki kapabilitas serta motivasi untuk berpartisipasi secara bermakna dalam kehidupan politik.

Sebaliknya, ketika demokrasi mengalami kemunduran, tiga mekanisme kausal dapat diidentifikasi dari pembahasan di atas. Pertama, mekanisme institusional, yakni melemahnya akuntabilitas kebijakan publik yang menyebabkan program pendidikan dan ketenagakerjaan kurang responsif terhadap kebutuhan riil generasi muda. Kedua, mekanisme struktural-sosial, yakni terkikisnya modal sosial dan terjadinya reproduksi ketidaksetaraan struktural yang membatasi mobilitas sosial generasi muda dari kelompok rentan. Ketiga, mekanisme kultural-epistemik, yakni menyempitnya ruang wacana publik yang rasional akibat polarisasi dan disinformasi, yang pada gilirannya melemahkan kapasitas kolektif masyarakat untuk menuntut akuntabilitas dari para pengambil kebijakan.

Ketiga mekanisme tersebut saling memperkuat dan membentuk lingkaran yang berpotensi mengubah bonus demografi menjadi beban demografis. Generasi muda yang terjebak dalam pengangguran dan pekerjaan informal cenderung kehilangan modal sosial dan kepercayaan terhadap institusi negara, yang kemudian termanifestasi dalam apatisisme politik. Apatisme ini, pada gilirannya, mengurangi tekanan publik terhadap elite politik untuk melakukan reformasi tata kelola yang inklusif, sehingga kebijakan pembangunan sumber daya manusia tetap berjalan secara teknokratis dan tidak partisipatif. Lingkaran ini hanya dapat diputus melalui intervensi simultan pada ranah institusional, struktural, dan kultural, yang menjadi dasar bagi rekomendasi kebijakan pada bagian penutup.

### **Tata Kelola Pendidikan dan Ketenagakerjaan dalam Bayang-Bayang Demokrasi yang Melemah**

Salah satu arena paling konkret tempat interseksi antara bonus demografi dan kemunduran demokrasi termanifestasi adalah tata kelola pendidikan dan ketenagakerjaan. Kebijakan pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan kerja yang dirumuskan oleh pemerintah pusat sering kali bersifat top-down dan kurang melibatkan masukan dari serikat pekerja, asosiasi industri lokal, maupun organisasi pemuda di tingkat daerah. Tanpa mekanisme partisipasi yang bermakna sebagaimana dituntut oleh konsep demokrasi substantif, kebijakan tersebut berisiko tidak selaras dengan kebutuhan riil pasar kerja di masing-masing daerah, yang pada akhirnya memperlebar jurang antara

keterampilan yang dihasilkan sistem pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja.

Persoalan serupa terjadi pada regulasi ketenagakerjaan sektor informal. Laporan ILO dan Bank Dunia menegaskan bahwa pekerja informal di Indonesia umumnya tidak memiliki akses terhadap perlindungan sosial dan jaminan ketenagakerjaan yang adekuat, sementara proses revisi regulasi ketenagakerjaan dalam beberapa tahun terakhir cenderung minim melibatkan konsultasi publik yang substantif dengan kelompok pekerja itu sendiri. Pola pengambilan kebijakan yang tertutup ini mencerminkan secara langsung pelemahan akuntabilitas horizontal dan partisipasi publik yang menjadi inti dari demokrasi substantif, sehingga kebijakan ketenagakerjaan yang dihasilkan cenderung menguntungkan kelompok kepentingan tertentu ketimbang memperluas kesempatan kerja yang berkualitas bagi generasi muda secara luas.

Dari perspektif modal sosial, lemahnya keterlibatan komunitas lokal dalam perumusan kebijakan pendidikan dan ketenagakerjaan juga mengurangi rasa kepemilikan masyarakat terhadap program-program pembangunan sumber daya manusia. Akibatnya, program-program tersebut rentan dipandang sebagai proyek administratif yang terputus dari realitas lapangan, sebuah persoalan yang telah diidentifikasi sejak bagian pendahuluan kajian ini. Penguatan mekanisme partisipasi publik, termasuk melalui forum multipemangku kepentingan di tingkat daerah, menjadi prasyarat penting agar kebijakan pembangunan sumber daya manusia benar-benar mampu mengonversi bonus demografi menjadi produktivitas ekonomi yang nyata.

#### **Proyeksi Menuju Indonesia Emas 2045: Skenario dan Tantangan**

Berdasarkan keseluruhan pembahasan di atas, dapat disusun dua skenario proyeksi mengenai masa depan Indonesia menjelang tahun 2045. Skenario pertama, yang dapat disebut skenario optimis, mengandaikan bahwa reformasi tata kelola demokrasi—termasuk penguatan independensi peradilan, kebebasan pers, dan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan sumber daya manusia—berhasil dilakukan secara konsisten dalam dekade mendatang. Dalam skenario ini, bonus demografi berpotensi terkonversi menjadi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sejalan dengan argumen Amartya Sen bahwa kebebasan politik dan pembangunan ekonomi saling memperkuat satu sama lain.

Skenario kedua, yang dapat disebut skenario pesimis, mengandaikan berlanjutnya tren kemunduran demokrasi yang telah diidentifikasi oleh Freedom House dan V-Dem Institute. Dalam skenario ini, ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara akan terus menguat, partisipasi politik generasi muda akan semakin bergeser ke arah apatisme atau populisme transaksional, dan kebijakan pembangunan sumber daya manusia akan tetap bersifat teknokratis-eksklusif. Konsekuensinya, jendela bonus demografi yang menurut para demograf hanya akan terbuka untuk waktu yang terbatas berisiko tertutup tanpa dimanfaatkan secara optimal, sehingga Indonesia berpotensi mengalami apa yang disebut sebagai middle income trap yang diperparah oleh persoalan legitimasi politik.

Kedua skenario tersebut menegaskan bahwa pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 bukan semata-mata fungsi dari kebijakan ekonomi dan pendidikan yang tepat secara teknis, melainkan sangat bergantung pada kualitas demokrasi yang menyertainya. Sintesis filsafat, ilmu sosial, dan budaya yang telah diuraikan dalam pembahasan ini menunjukkan bahwa ketiga ranah tersebut memberikan argumen yang konvergen: tanpa ruang publik yang rasional, tanpa modal sosial yang kuat, dan tanpa budaya politik yang partisipatif, potensi demografis Indonesia akan sulit terkonversi menjadi kekuatan pembangunan yang berkelanjutan.

#### **Peran Masyarakat Sipil dan Media dalam Mengawal Demokrasi Substantif**

Masyarakat sipil menempati posisi kunci dalam menjaga kualitas demokrasi substantif di tengah dinamika bonus demografi. Larry Diamond menekankan bahwa organisasi masyarakat sipil yang independen berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan negara, sekaligus sebagai wadah artikulasi kepentingan kelompok-kelompok yang kurang terwakili dalam proses politik formal, termasuk generasi muda dan pekerja sektor informal. Namun, riset terbaru mengenai ruang sipil di Indonesia menunjukkan adanya tren pembatasan melalui regulasi organisasi kemasyarakatan, kriminalisasi aktivis, dan intimidasi terhadap pembela hak asasi manusia, yang secara kumulatif mempersempit kapasitas masyarakat sipil untuk menjalankan fungsi pengawasannya.

Media massa dan media digital juga memainkan peran ganda yang kompleks. Di satu sisi, jurnalisme independen merupakan pilar penting akuntabilitas demokratis karena menyediakan informasi yang diperlukan publik untuk mengawasi kinerja pemerintah. Di sisi lain, konsentrasi kepemilikan media oleh kelompok bisnis yang memiliki afiliasi politik tertentu berisiko mengurangi keberagaman wacana publik, sehingga isu-isu struktural seperti pengangguran pemuda dan kerentanan sektor informal kurang mendapatkan perhatian proporsional dibandingkan isu-isu politik elektoral jangka pendek. Kondisi ini memperkuat argumen Habermas bahwa kualitas ruang publik deliberatif sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi-politik media itu sendiri.

Inisiatif jurnalisme warga dan gerakan advokasi berbasis komunitas yang tumbuh di berbagai daerah menunjukkan bahwa ruang sipil tidak sepenuhnya tertutup, melainkan terus bernegosiasi dengan tekanan pembatasan tersebut. Penguatan kapasitas literasi digital dan literasi kritis di kalangan generasi muda menjadi strategi penting agar partisipasi dalam ruang digital tidak hanya bersifat reaktif terhadap polarisasi, tetapi juga produktif dalam membangun wacana publik yang rasional, sejalan dengan kapabilitas dasar warga negara yang ditekankan oleh Nussbaum.

#### **Dimensi Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial dalam Konversi Bonus Demografi**

Pembahasan mengenai bonus demografi dan demokrasi substantif tidak lengkap tanpa memperhitungkan dimensi kesetaraan gender dan inklusi sosial. Data BPS dan UNDP menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan laki-laki, sementara perempuan muda menghadapi hambatan struktural berlapis dalam mengakses pendidikan tinggi, pelatihan vokasi, maupun jabatan kepemimpinan di sektor formal. Amartya Sen, melalui pendekatan kapabilitas, menegaskan bahwa pembangunan yang sejati harus diukur dari perluasan pilihan dan kebebasan substantif bagi seluruh warga negara, termasuk kelompok yang secara historis termarginalkan, bukan semata-mata dari pertumbuhan agregat ekonomi.

Demokrasi substantif yang melemah turut berdampak tidak proporsional terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat di wilayah terpencil, karena kebijakan publik yang dirumuskan tanpa partisipasi bermakna cenderung mengabaikan kebutuhan spesifik kelompok-kelompok tersebut. Penelitian ilmu sosial mengenai intersectionality, sebagaimana dikembangkan oleh Kimberle Crenshaw, relevan untuk membaca bagaimana berbagai bentuk ketidaksetaraan, yaitu gender, kelas, dan wilayah, saling tumpang tindih dan memperberat eksklusi kelompok tertentu dari manfaat bonus demografi.

Oleh karena itu, agenda penguatan demokrasi substantif perlu secara eksplisit mengarusutamakan perspektif gender dan inklusi sosial, baik dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan maupun dalam desain mekanisme partisipasi publik. Tanpa langkah ini, konversi bonus demografi berisiko hanya menguntungkan kelompok yang sudah

memiliki modal sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih besar, sehingga memperlebar ketimpangan struktural ketimbang menguranginya.

### **Pembelajaran Komparatif: Korea Selatan, Brasil, dan Pelajaran bagi Indonesia**

Perbandingan dengan pengalaman negara lain memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia. Korea Selatan pada paruh akhir abad ke-20 berhasil mengonversi bonus demografinya menjadi pertumbuhan ekonomi yang pesat, yang pada gilirannya turut mendorong transisi menuju demokrasi yang lebih substantif pasca-1987. Investasi besar pada pendidikan dasar dan menengah yang merata, dikombinasikan dengan tekanan masyarakat sipil yang menuntut keterbukaan politik, menjadi faktor penting yang saling memperkuat antara pembangunan ekonomi dan demokratisasi.

Sebaliknya, pengalaman Brasil menunjukkan kerumitan yang lebih besar. Meskipun mengalami bonus demografi dan periode pertumbuhan ekonomi yang signifikan pada awal tahun 2000-an, Brasil kemudian menghadapi krisis politik dan kemunduran demokrasi yang ditandai oleh polarisasi tajam dan pelemahan institusi antikorupsi, sebagaimana dicatat oleh berbagai laporan V-Dem Institute. Kasus Brasil menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi jangka pendek dari bonus demografi tidak otomatis menghasilkan konsolidasi demokrasi yang berkelanjutan apabila tidak diiringi oleh penguatan institusi hukum dan akuntabilitas yang konsisten.

Pelajaran komparatif ini relevan bagi Indonesia dalam dua hal. Pertama, investasi pada pendidikan yang merata dan berkualitas perlu menjadi prioritas yang konsisten, tidak hanya pada tataran kebijakan tetapi juga pada tataran implementasi di tingkat daerah. Kedua, penguatan institusi antikorupsi dan supremasi hukum harus berjalan seiring dengan kebijakan pembangunan ekonomi, agar manfaat dari bonus demografi tidak terdistorsi oleh praktik rente dan korupsi yang justru diperburuk oleh lemahnya akuntabilitas demokratis.

### **Risiko Populisme dan Politik Identitas terhadap Kohesi Sosial**

Kemunduran demokrasi substantif sering kali berjalan seiring dengan menguatnya populisme dan politik identitas yang memanfaatkan ketidakpuasan publik terhadap ketimpangan ekonomi dan ketidakpercayaan terhadap elite. Jan-Werner Muller mendefinisikan populisme sebagai klaim moral eksklusif untuk merepresentasikan rakyat sejati, yang pada praktiknya sering digunakan untuk mendelegitimasi oposisi politik, pers independen, dan lembaga pengawas sebagai bagian dari elite yang dianggap korup. Pola wacana semacam ini ditemukan pula dalam dinamika politik Indonesia kontemporer, khususnya pada periode kontestasi elektoral yang ditandai oleh polarisasi identitas keagamaan dan etnis.

Polarisasi identitas ini berdampak langsung pada kohesi sosial yang dibutuhkan generasi muda untuk membangun solidaritas lintas kelompok dalam memperjuangkan kepentingan bersama, misalnya tuntutan atas lapangan kerja yang layak atau perlindungan sosial yang lebih baik. Ketika energi politik justru tersedot pada pertarungan identitas yang tidak substantif, agenda struktural mengenai ketenagakerjaan dan pendidikan cenderung terpinggirkan dari wacana publik utama. Stuart Hall mengingatkan bahwa wacana identitas yang dimobilisasi secara politis sering kali menyembunyikan kepentingan ekonomi-politik kelompok elite yang memperoleh keuntungan dari status quo.

Dengan demikian, penguatan demokrasi substantif tidak dapat dilepaskan dari upaya membangun kembali kohesi sosial lintas identitas, melalui pendidikan kewargaan yang menekankan nilai pluralisme serta penguatan ruang dialog lintas kelompok di tingkat komunitas. Tanpa kohesi sosial yang memadai, generasi muda yang seharusnya

menjadi kekuatan kolektif bagi reformasi tata kelola justru berisiko terfragmentasi ke dalam kubu-kubu identitas yang saling berhadapan, sehingga melemahkan basis sosial bagi konsolidasi demokrasi.

### **Arah Reformasi Kebijakan: Sinkronisasi Agenda Demografi dan Demokrasi**

Bertolak dari seluruh pembahasan di atas, sinkronisasi antara agenda pemanfaatan bonus demografi dan agenda penguatan demokrasi substantif menjadi kebutuhan mendesak. Sinkronisasi ini dapat dilakukan melalui setidaknya tiga jalur kebijakan. Jalur pertama adalah integrasi perencanaan pembangunan sumber daya manusia dengan indikator kualitas tata kelola, sehingga dokumen perencanaan pembangunan tidak hanya memuat target pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, tetapi juga target peningkatan partisipasi publik dan akuntabilitas kebijakan di sektor pendidikan dan ketenagakerjaan.

Jalur kedua adalah desentralisasi mekanisme partisipasi melalui penguatan forum multipemangku kepentingan di tingkat daerah, yang melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, serikat pekerja, organisasi masyarakat sipil, dan representasi generasi muda secara langsung dalam perumusan kebijakan pendidikan vokasi dan ketenagakerjaan lokal. Pendekatan desentralisasi partisipatif ini sejalan dengan argumen Giddens mengenai pentingnya mendekatkan struktur kebijakan dengan ruang agensi aktor-aktor di tingkat lokal, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap konteks sosial-budaya setempat sebagaimana ditekankan oleh Geertz.

Jalur ketiga adalah penguatan basis evidensi kebijakan melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil dalam memantau secara berkala hubungan antara indikator demografis, indikator ketenagakerjaan, dan indikator kualitas demokrasi. Pemantauan yang transparan dan dapat diakses publik akan memperkuat akuntabilitas horizontal sebagaimana ditekankan oleh Linz dan Stepan, sekaligus menyediakan basis argumentasi yang kuat bagi advokasi kebijakan oleh masyarakat sipil maupun komunitas akademik ke depan.

### **Catatan Kritis dan Keterbatasan Analisis**

Sekalipun kajian ini berupaya menyajikan sintesis interdisipliner yang komprehensif, beberapa catatan kritis perlu dikemukakan. Pertama, sebagai kajian kepustakaan analitis-kritis, artikel ini tidak menyertakan data primer dari wawancara atau survei lapangan yang dapat menangkap secara langsung pengalaman generasi muda dalam menghadapi pengangguran, prekarisasi kerja, maupun apatisisme politik. Generalisasi yang ditawarkan dalam kajian ini bersifat konseptual dan perlu diuji lebih lanjut melalui penelitian empiris berbasis data lapangan.

Kedua, keragaman konteks sosial-budaya dan ekonomi-politik antardaerah di Indonesia berarti bahwa pola hubungan antara bonus demografi dan kemunduran demokrasi yang diuraikan dalam kajian ini tidak dapat diasumsikan berlaku secara homogen di seluruh wilayah. Daerah dengan struktur ekonomi berbasis sumber daya alam, misalnya, mungkin menghadapi dinamika oligarki lokal yang berbeda dibandingkan daerah dengan struktur ekonomi berbasis jasa atau manufaktur, sehingga rekomendasi kebijakan yang bersifat seragam secara nasional perlu diadaptasi sesuai konteks lokal masing-masing.

Ketiga, penggunaan kerangka teori yang berasal dari pengalaman negara-negara Barat, seperti Habermas dan Arendt, maupun negara berkembang lain seperti Brasil, memerlukan kehati-hatian dalam penerapannya pada konteks Indonesia yang memiliki sejarah, struktur sosial, dan budaya politik tersendiri. Kajian ini berupaya melakukan adaptasi kontekstual melalui rujukan pada penelitian Vedi Hadiz dan Marcus Mietzner

yang secara khusus mengkaji dinamika oligarki dan otoritarianisme elektoral di Indonesia, namun pengayaan lebih lanjut melalui kajian komparatif intra-Asia Tenggara tetap diperlukan untuk memperkuat validitas argumen yang diajukan.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Kajian ini menunjukkan bahwa bonus demografi merupakan peluang strategis bagi Indonesia untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas demokrasi substantif. Kemunduran demokrasi yang ditandai dengan melemahnya institusi sipil, terbatasnya partisipasi publik, dan menguatnya praktik oligarki berpotensi menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, serta pembangunan yang inklusif. Oleh karena itu, penguatan demokrasi substantif perlu ditempatkan sebagai prasyarat utama dalam mengoptimalkan bonus demografi melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pemerintah diharapkan memperkuat kebijakan pembangunan sumber daya manusia yang melibatkan partisipasi masyarakat, sementara lembaga negara, masyarakat sipil, dan media perlu memperkuat fungsi pengawasan, literasi demokrasi, dan ruang partisipasi publik. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan kajian empiris, baik kuantitatif maupun lapangan, untuk menguji hubungan antara kualitas demokrasi dan pemanfaatan bonus demografi pada berbagai wilayah di Indonesia sehingga dapat menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan yang lebih komprehensif dan berbasis bukti.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Hidayat, N., Phonna, M., Hasugian, F. M. S., Wulandari, M., Bakara, S., & Angelia, T. (2026). *Bonus Demografi Sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi*. <https://doi.org/https://doi.org/10.57235/jetbus.v3i1.8618>
- Meo, T. B., Baowolo, D. L., Maro, B. A., & Dima, E. T. Y. (2025). Memanfaatkan Bonus Demografi Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Antara Potensi Produktif Dan Ancaman Pengangguran. *Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*. <https://doi.org/https://doi.org/10.2324/rgd9sg48>
- Noor, M. S., & Shaddiq, S. (2023). *Bonus Demografi Menyongsong Indonesia Emas 2045*. CV. Mine.
- Rakhmadi, R. (2024). Menuju Indonesia Emas 2045 : Peran Generasi Muda Bidang Sosial , Teknologi , dan Ekonomi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (JPM) Terekam Jejak*, 1, 1–8.
- Sutikno, A. N. (2020). Bonus Demografi Di Indonesia. *Visioner Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*.
- Wibowo, A. S., Setiawan, F. D., & Suparmi. (2026). Bonus Demografi 2030 : Kesiapan Generasi Muda Memahami Hak Dan Kewajiban Sebagai Warga. *Jurnal Ilmiah Nusantara ( JINU)*, 3(1), 1223–1235.